

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

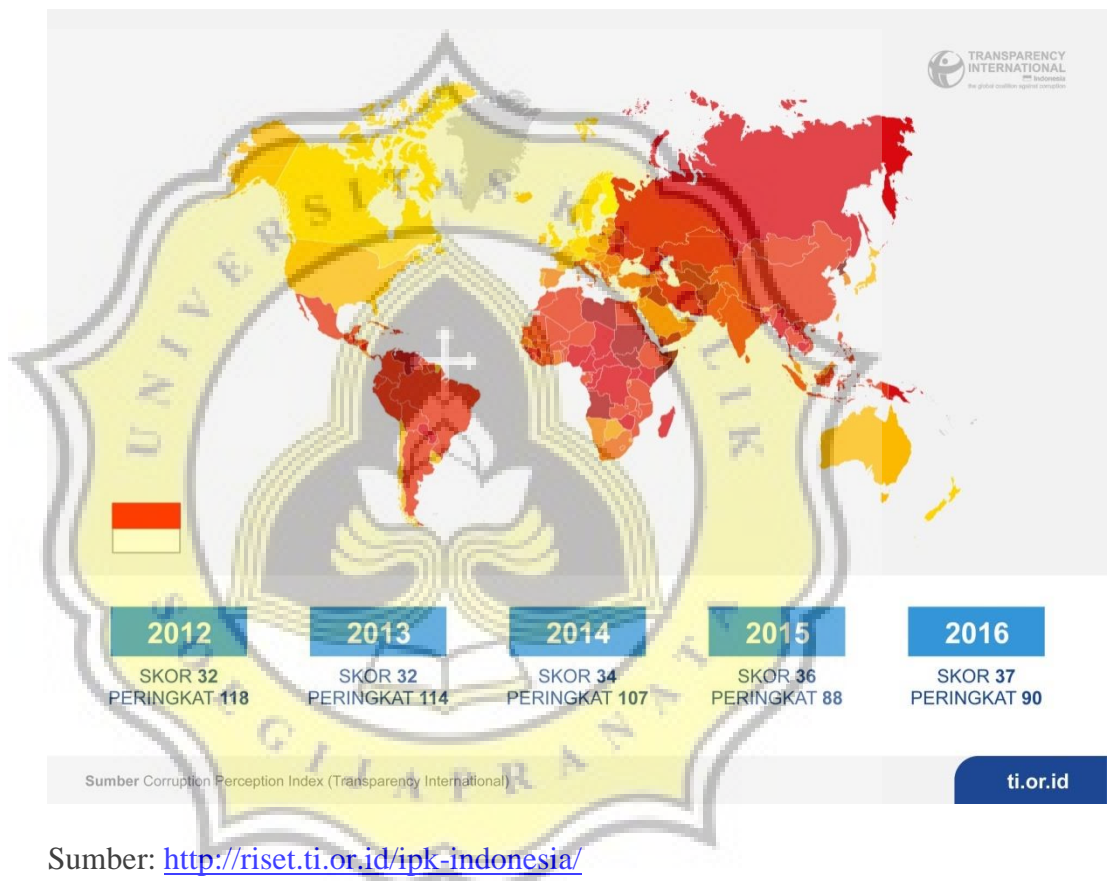
Pada era yang modern ini globalisasi sudah menembus hampir semua aspek dalam kehidupan contohnya ekonomi, teknologi informasi, sosial budaya, hukum dan pertahanan dan sebagainya. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan perkembangan pesat industri-industri di dunia, munculnya perusahaan raksasa berskala multinasional yang menguasai pasar tertentu di dunia. Misalnya saja perusahaan barang konsumsi Nestlé S.A. Produknya telah tersebar dan menguasai pasar makanan dan minuman di dunia.

Perkembangan pesat industri tersebut tentunya baik bagi perekonomian suatu negara maupun internasional. Namun perkembangan tersebut tidak selalu diikuti dengan hal positif, ada juga dampak negatif salah satunya adalah korupsi yang juga makin marak terjadi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Korupsi dapat dikelompokkan dalam tujuh jenis tindak pidana.

Berdasarkan data dari Transparency International (TI), indeks persepsi korupsi Indonesia memiliki skor 37 pada tahun 2016 dan 2017. Dengan keterangan 0 menunjukkan sangat korup dan 100 menunjukkan sangat bersih dari korupsi. Dengan skor

37 tentu masih jauh dari kata memuaskan dan dapat dibanggakan. Upaya pemberantasan korupsi harus ditanamkan sedini mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat yang paling dasar yakni individu hingga organisasi atau korporasi.

Gambar 1.1. Skor CPI Indonesia



Sumber: <http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/>

Korupsi bisa terjadi di berbagai kalangan mulai dari perorangan hingga korporasi, di institusi swasta atau pemerintahan, dan bisa terjadi mulai dari kasus yang paling ringan sampai dengan tindak pidana berat yang merugikan negara dan masyarakat luas. Penyebab korupsi salah satunya karena konflik kepentingan antara pelakunya. Misalnya perusahaan yang ingin memenangkan persaingan tender proyek maka

menyuap pihak yang mengambil keputusan. Dalam hal tersebut, pelaku memiliki kepentingan untuk memenangkan tender dan penerima juga memiliki kepentingan yaitu mendapatkan keuntungan pribadi hasil dari penyuapan. Hal tersebut mungkin terdengar tidak terlalu merugikan, tetapi pada kenyataannya sangatlah merugikan terutama bila perusahaan yang menyuap tidak memberikan kualitas dan spesifikasi produk tetapi hanya bergantung pada uang tambahan untuk memenangkannya.

Contoh nyata kasus korupsi perusahaan adalah kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) yang semula bernama PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang menjadi penyedia barang dan jasa untuk proyek Wisma Atlet Jakabaring, Palembang dengan bantuan Muhammad Nazaruddin. Atas bantuan M Nazaruddin tersebut, PT NKE atau PT DGI memberikan uang balas jasa kepada Nazaruddin yakni Rp4.675.700.000 untuk proyek WismaAltet Jakabaring. PT NKE terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP (<https://nasional.kompas.com>, 2019).

Karena sangat merugikan negara dan masyarakat serta menghancurkan moral orang-orang, maka korupsi harus diberantas dan keadilan ditegakkan. Di Indonesia sendiri terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebuah lembaga independen yang dibentuk pada tahun 2002 dan bertujuan mengupayakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tentunya KPK tidak bisa memberantas semua kasus korupsi di Indonesia dikarenakan sumber daya yang tidak cukup memadai apabila harus mencakup seluruh bagian negara Indonesia yang sangat luas. Maka upaya melawan korupsi yang berdasarkan kesadaran sendiri sangatlah penting. Kesadaran perusahaan untuk melawan korupsi tercermin dari berbagai hal salah satunya pengungkapan anti korupsi yang ada di laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan anti korupsi perusahaan menjadi topik yang menarik untuk diteliti dan penulis akan meneliti topik tersebut dalam penelitian ini.

Pengungkapan anti korupsi perusahaan di laporan tahunan dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel diantaranya: Kualitas Audit, Keberadaan Komite Tata Kelola, Risiko Industri, Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik dan Diversifikasi Perusahaan. Dalam penelitian ini penulis akan menguji apakah variabel-variabel tersebut terbukti mempengaruhi pengungkapan anti korupsi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai variabel-variabel tersebut.

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan dengan jujur tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit dapat diukur salah satunya dengan ukuran KAP. Elder et al. (2011) membedakan jenis KAP menjadi *big 4* dan *non big 4*, dan menggambarkan ukurannya berdasarkan jumlah tenaga profesional yang dimiliki, kantor cabangnya, serta *fee income* yang diperoleh KAP

pertahun. Penelitian sebelumnya yang mendukung variabel ini yaitu Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipengaruhi oleh KAP *Big 4*, Wang et al. (2008) mengemukakan tingkat pengungkapan sukarela untuk perusahaan meningkat jika mereka diaudit oleh KAP *Big 4* dan KAP *Big 4* yang mendorong pengungkapan yang lebih transparan dari perusahaan serta Malagueno et al. (2010) menyatakan kualitas informasi akuntansi yang diprosikan oleh peningkatan keberadaan KAP *Big 4* memiliki dampak yang signifikan pada tingkat korupsi di suatu negara.

Komite tata kelola atau *corporate governance committee* merupakan sebuah komite yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi (Wiley, 2010). Tujuan utama komite ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan tata kelola (Charitou et al. 2007). Penelitian sebelumnya yang mendukung variabel ini yaitu Nasir et al. (2014) mengemukakan bahwa *governance committee* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan LQ 45 dan Malau (2017) menemukan bahwa tata kelola yang diprosikan oleh keberadaan komite tata kelola berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan.

Paparan perusahaan terhadap korupsi akan ditentukan oleh industri di mana mereka beroperasi. Industri yang bernegosiasi dengan pemerintah atau menjual produk dan layanan kepada pemerintah dianggap berisiko tinggi (Healy & Serafeim, 2013). Penelitian sebelumnya yang mendukung

variabel ini yaitu de Melo (2015) menemukan hubungan antara risiko industri dengan pengungkapan anti korupsi perusahaan, Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipengaruhi oleh Risiko Industri serta Young & Marais (2012) mengutarakan bahwa semakin perusahaan berada dalam industri berisiko tinggi, semakin banyak mereka melaporkan informasi tentang CSR secara keseluruhan.

Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Politisi adalah sebutan bagi orang yang bergiat di bidang politik, biasanya merupakan pengurus partai atau aktivis partai (Silaen et al., 2007). Maka anggota komisaris yang berafiliasi politik adalah anggota dewan komisaris yang bergiat di bidang politik. Di dalam penelitian ini, penulis berfokus pada anggota komisaris yang berafiliasi politik. Bahwasanya politisi berkaitan erat dengan terjadinya korupsi. Penelitian sebelumnya yang mendukung variabel ini yaitu yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (2015) bahwa sebesar 52,3 persen anggota DPR RI 2014-2019 berlatar belakang pengusaha atau menjabat dalam perusahaan dan sebesar 11 persen atau 32 perusahaan memiliki potensi konflik kepentingan langsung dengan jabatan, wewenang dan tugas anggota DPR yang bersangkutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) mengenai tindak pidana

korupsi profesi/jabatan yang paling banyak adalah anggota DPR dan DPRD sebanyak 205 atau 23,6 persen.

Diversifikasi diartikan sebagai perusahaan yang mengembangkan bisnis utamanya ke bisnis lainnya (Gluck, 1985). Pitts & Hopkins (1982) menyatakan diversifikasi yang diaplikasikan pada perusahaan bisnis berarti perbedaan aspek pada aktivitas perusahaan. Penelitian sebelumnya yang mendukung variabel ini yaitu Bens & Monahan(2004) mengemukakan untuk perusahaan multi-segmen ada hubungan yang signifikan secara statistik dengan kualitas pengungkapan dan Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipengaruhi oleh diversifikasi serta Chan (2003) mengutarakan bahwa perusahaan dengan tingkat diversifikasi yang lebih tinggi lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai segmen secara sukarela.

Hal yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu adanya variabel Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik. Dimana variabel tersebut belum pernah digunakan di dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa Unika Soegijapranata. Sehingga variabel tersebut menjadi pembaharuan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Audit, Keberadaan Komite Tata Kelola, Risiko Industri, Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik dan Diversifikasi Perusahaan terhadap Pengungkapan Anti Korupsi”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah Kualitas Audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi?
- 1.2.2. Apakah Keberadaan Komite Tata Kelola memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi?
- 1.2.3. Apakah Risiko Industri memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi?
- 1.2.4. Apakah Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?
- 1.2.5. Apakah Diversifikasi Perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

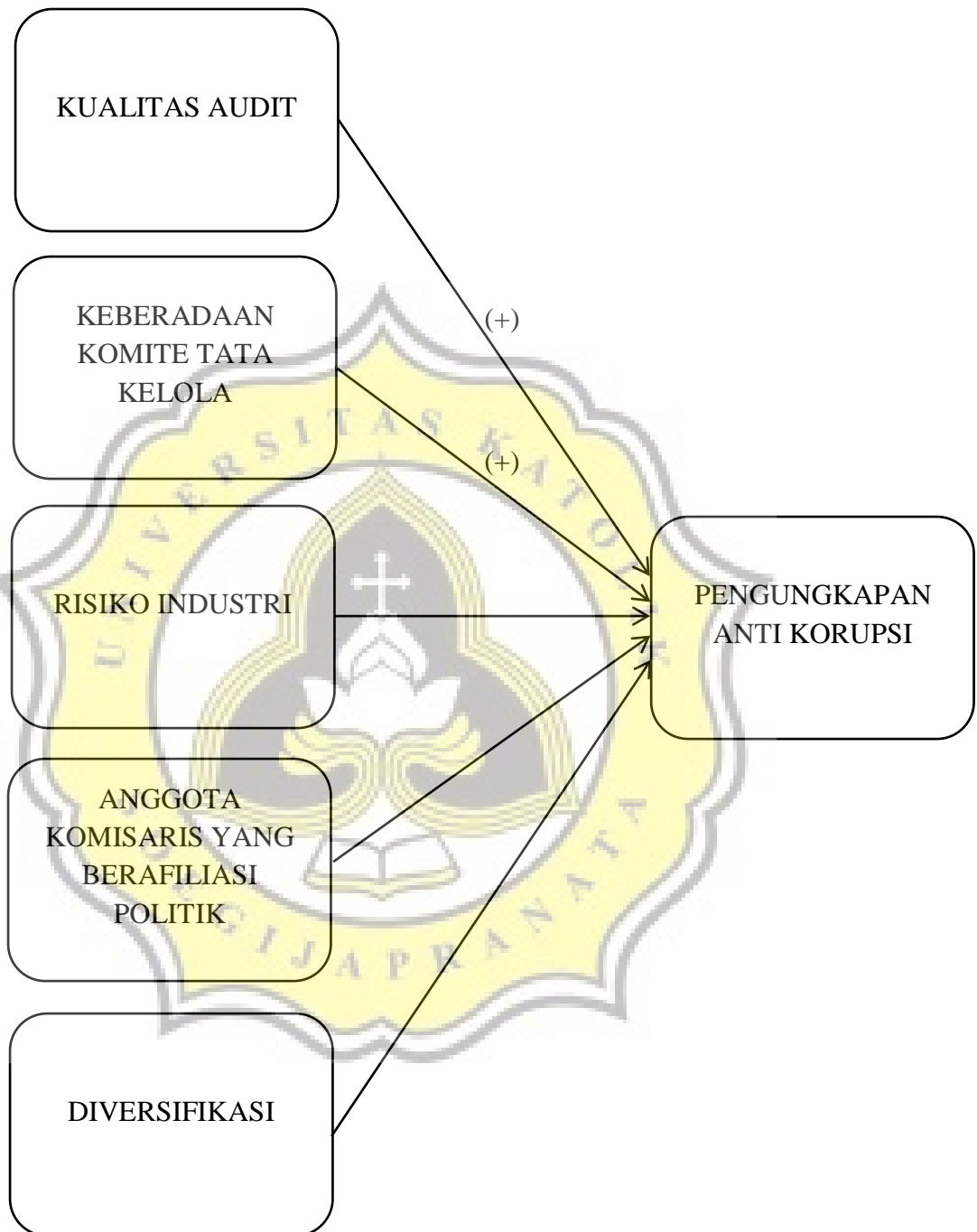
Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1.1. Mengetahui pengaruh positif Kualitas Audit terhadap pengungkapan anti korupsi
- 1.3.1.2. Mengetahui pengaruh positif Keberadaan Komite Tata Kelola terhadap pengungkapan anti korupsi
- 1.3.1.3. Mengetahui pengaruh positif Risiko Industri terhadap pengungkapan anti korupsi
- 1.3.1.4. Mengetahui pengaruh Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik terhadap pengungkapan anti korupsi
- 1.3.1.5. Mengetahui pengaruh Diversifikasi Perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat praktek. Menurut (Hartono, 2013) kontribusi praktek menunjukkan bahwa hasil dari riset dapat digunakan untuk diterapkan di praktek nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktek yang ada dengan lebih baik.

1.4. Kerangka Pikir



1.5. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ini dalam lima bab yang saling berkaitan, dan tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab memberikan informasi yang berbeda namun memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berupa teori-teori pendukung bagi penelitian ini dan pengembangan hipotesis yang menguraikan perumusannya berdasarkan fakta-fakta, teori dan penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis tersebut.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel-variabel dan metode analisis data atau pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL ANALISIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil dari penelitian. Hasil dan analisis data yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji model fit, koefisien determinasi dan hasil analisis hipotesis menggunakan regresi linear berganda.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan, saran-saran, keterbatasan penelitian yang diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya yang disampaikan penulis kepada pembaca.

